



**panrb**

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

# LAPORAN HASIL EVALUASI SPBE TAHUN 2024

## PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA



*Sinergi untuk Indonesia Maju*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga seluruh agenda tahapan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat dilaksanakan pada Tahun 2024. Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Besar harapan kami bahwa hasil evaluasi SPBE tahun 2024 dapat menggambarkan progres kemajuan penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga memberikan panduan bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk peningkatan penerapan SPBE dalam rangka keterpaduan penerapan SPBE yang selaras dengan kebijakan nasional. Dengan semangat tersebut, maka dampak terciptanya layanan SPBE berkualitas, terintegrasi, dan berdaya guna yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi masyarakat luas dapat diwujudkan secara konkret.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya atas upaya yang telah dilakukan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan progres penerapan SPBE, serta sinergi yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian/Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional dan Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, sehingga pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik dan berjalan lancar.

Jakarta, 1 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**NANIK MURWATI**

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata  
Laksana

NIP. 197208081996032001

# EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

## Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan Evaluasi SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi SPBE ini, diharapkan dapat dimanfaatkan dalam menentukan arah tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada masyarakat dan terwujudnya Pemerintah Digital dalam kerangka Transformasi Digital Pemerintah.

## Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

## Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE diukur dengan model tingkat kematangan SPBE, di mana setiap tingkat kematangan akan dideskripsikan dengan suatu kriteria yang menggambarkan karakteristik kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE yang terdiri atas 5 (lima) tingkatan, di mana semakin tinggi tingkat kematangan yang dimiliki oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menunjukkan semakin tinggi kapabilitas Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut.

Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, Penilaian Interview, serta Penilaian Visitasi (pada lokus tertentu).

## Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

### Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Proses



### Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Fungsi



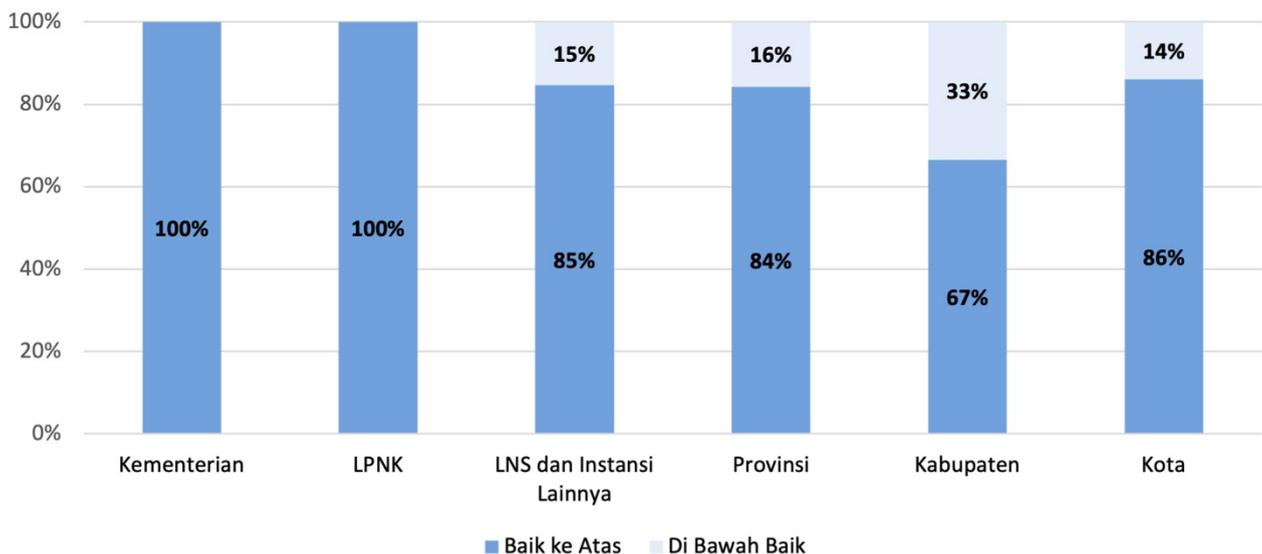
# EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE																				
<b>Domain 1 - Kebijakan SPBE</b>	<b>13%</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>NILAI INDEKS</th> <th>PREDIKAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4,2 – 5,0</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3,5 – &lt; 4,2</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,6 – &lt; 3,5</td> <td>Baik *)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,8 – &lt; 2,6</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>&lt; 1,8</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik *)	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang		
NO	NILAI INDEKS		PREDIKAT																			
1	4,2 – 5,0		Memuaskan																			
2	3,5 – < 4,2		Sangat Baik																			
3	2,6 – < 3,5		Baik *)																			
4	1,8 – < 2,6		Cukup																			
5	< 1,8		Kurang																			
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%																					
<b>Domain 2 - Tata Kelola SPBE</b>	<b>25%</b>																					
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%																					
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%																					
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%																					
<b>Domain 3 - Manajemen SPBE</b>	<b>16,5%</b>																					
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%																					
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%																					
<b>Domain 4 - Layanan SPBE</b>	<b>45,5%</b>																					
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%																					
Aspek 8 - Layanan Publik	18%																					

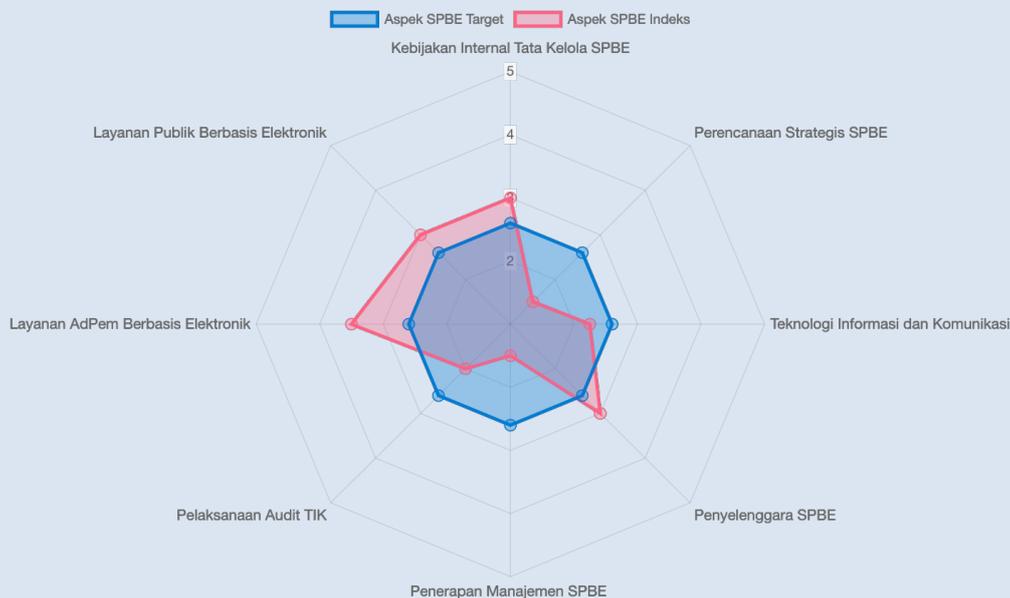
\*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Rata-Rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	LNS dan Instansi Lainnya	Provinsi	Kabupaten	Kota
<b>SPBE</b>	3,12	4,03	3,82	3,37	3,42	2,45	3,39
<b>Domain Kebijakan</b>	<b>3,36</b>	<b>4,28</b>	<b>4,01</b>	<b>3,61</b>	<b>3,61</b>	<b>2,51</b>	<b>3,64</b>
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	3,23	3,64
<b>Domain Tata Kelola</b>	<b>2,62</b>	<b>3,92</b>	<b>3,65</b>	<b>3,11</b>	<b>3,07</b>	<b>1,69</b>	<b>2,94</b>
Perencanaan Strategis	2,41	3,74	3,68	3,01	2,84	1,54	2,60
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,75	4,06	3,75	3,11	3,26	1,76	3,10
Penyelenggaraan SPBE	2,80	4,00	3,40	3,32	3,14	1,85	3,31
<b>Domain Manajemen</b>	<b>1,86</b>	<b>2,87</b>	<b>2,61</b>	<b>2,31</b>	<b>2,17</b>	<b>1,13</b>	<b>2,03</b>
Penerapan Manajemen SPBE	1,91	2,96	2,68	2,38	2,19	1,16	2,09
Audit TIK	1,73	2,64	2,44	2,13	2,12	1,07	1,88
<b>Domain Layanan SPBE</b>	<b>3,78</b>	<b>4,44</b>	<b>4,26</b>	<b>3,81</b>	<b>3,98</b>	<b>3,32</b>	<b>4,05</b>
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,77	4,35	4,20	3,90	3,95	3,40	3,99
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,80	4,58	4,36	3,67	4,04	3,21	4,15

**Distribusi Indeks SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Predikat Tahun 2024**



**Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek**



<b>Nama Indeks</b>	<b>Nilai 2024</b>
<b>SPBE</b>	<b>2,69</b>
<b>Domain Kebijakan SPBE</b>	<b>3,00</b>
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	<i>3,00</i>
<b>Domain Tata Kelola SPBE</b>	<b>2,10</b>
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	<i>1,50</i>
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	<i>2,25</i>
<i>Penyelenggara SPBE</i>	<i>3,00</i>
<b>Domain Manajemen SPBE</b>	<b>1,64</b>
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	<i>1,50</i>
<i>Audit TIK</i>	<i>2,00</i>
<b>Domain Layanan SPBE</b>	<b>3,30</b>
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	<i>3,50</i>
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	<i>3,00</i>

## KEKUATAN DAN KELEMAHAN

### A. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara adalah dengan adanya Kebijakan Internal Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Kebijakan Internal Manajemen Data, Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE, Kebijakan Internal Layanan Pusat Data, Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi, Kebijakan Internal Audit TIK, dan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

- **Kekuatan**  
Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE ini dapat terlihat adanya Kebijakan Internal Manajemen Data, yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
- **Kelemahan**  
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Maluku Utara masih belum memiliki Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang mengatur terkait Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE, dimana tidak ditemukan adanya pelaksanaan secara komprehensif atau bukti dukung yang disampaikan belum cukup untuk Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE.

### B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara adalah dengan adanya Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE.

- **Kekuatan**  
Pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE ini belum terlihat adanya kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
- **Kelemahan**  
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Maluku Utara masih belum memiliki Perencanaan Strategis SPBE yang mengatur terkait Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE, Inovasi Proses Bisnis SPBE, dimana tidak ditemukan adanya pelaksanaan secara komprehensif atau bukti dukung yang disampaikan belum cukup untuk Aspek Perencanaan Strategis SPBE.

### C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara adalah dengan adanya Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

- **Kekuatan**  
Pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi ini belum terlihat adanya kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
- **Kelemahan**  
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Maluku Utara masih belum memiliki Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mengatur terkait Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dimana tidak ditemukan adanya pelaksanaan secara komprehensif atau bukti dukung yang disampaikan belum cukup untuk Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi.

### D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penyelenggara SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara adalah dengan adanya Kebijakan Internal Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dan Kolaborasi Penerapan SPBE.

- **Kekuatan**

Pada Aspek Penyelenggara SPBE ini dapat terlihat adanya Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

- Kelemahan  
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Maluku Utara masih belum memiliki Penyelenggara SPBE yang mengatur terkait Kolaborasi Penerapan SPBE, dimana tidak ditemukan adanya pelaksanaan secara komprehensif atau bukti dukung yang disampaikan belum cukup untuk Aspek Penyelenggara SPBE.

#### E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara adalah dengan adanya Kebijakan Internal Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Penerapan Manajemen Data, dan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE.

- Kekuatan  
Pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE ini belum terlihat adanya kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
- Kelemahan  
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Maluku Utara masih belum memiliki Penerapan Manajemen SPBE yang mengatur terkait Penerapan Manajemen Risiko SPBE, Penerapan Manajemen Data, Penerapan Manajemen Aset TIK, Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE, Penerapan Manajemen Pengetahuan, Penerapan Manajemen Perubahan, Penerapan Manajemen Layanan SPBE, dimana tidak ditemukan adanya pelaksanaan secara komprehensif atau bukti dukung yang disampaikan belum cukup untuk Aspek Penerapan Manajemen SPBE.

#### F. Pelaksanaan Audit TIK

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Pelaksanaan Audit TIK yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara adalah dengan adanya Kebijakan Internal Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE, dan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE.

- Kekuatan  
Pada Aspek Pelaksanaan Audit TIK ini belum terlihat adanya kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
- Kelemahan  
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Maluku Utara masih belum memiliki Pelaksanaan Audit TIK yang mengatur terkait Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE, Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE, dimana tidak ditemukan adanya pelaksanaan secara komprehensif atau bukti dukung yang disampaikan belum cukup untuk Aspek Pelaksanaan Audit TIK.

#### G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara adalah dengan adanya Kebijakan Internal Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, Layanan Pengawasan Internal Pemerintah, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dan Layanan Kinerja Pegawai.

- Kekuatan  
Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik ini dapat terlihat adanya Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
- Kelemahan  
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Maluku Utara masih belum memiliki Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mengatur terkait Layanan Pengawasan Internal Pemerintah, Layanan Kinerja Pegawai, dimana tidak ditemukan adanya pelaksanaan secara komprehensif atau bukti dukung yang disampaikan belum cukup untuk Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik.

#### H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara adalah dengan adanya Kebijakan Internal Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Layanan Publik Sektor 1, Layanan Publik Sektor 2, dan Layanan Publik Sektor 3.

- Kekuatan

Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik ini dapat terlihat adanya Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

- Kelemahan

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Maluku Utara masih belum memiliki Layanan Publik Berbasis Elektronik yang mengatur terkait Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), dimana tidak ditemukan adanya pelaksanaan secara komprehensif atau bukti dukung yang disampaikan belum cukup untuk Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik.

## REKOMENDASI

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata Kelola, dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemerintah Provinsi Maluku Utara, sudah dapat menggambarkan predikat Baik dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan.

Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara adalah pada penerapan Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik. Keunggulan ini terlihat dari dengan adanya pengintegrasian dengan aplikasi umum berbagi pakai pada bidang perencanaan, penganggaran dan keuangan melalui penerapan SIPD, pengadaan barang dan jasa dengan aplikasi LPSE, kepegawaian dengan menerapkan SIASN dan MYASN, kearsipan dinamis melalui aplikasi Srikandi, dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan aplikasi e-Sakip, sehingga secara administratif dapat terinventarisasi dan terdokumentasi secara baik. Seluruh keunggulan tersebut saling terkait, sehingga dapat memberikan gambaran pelaksanaan SPBE di internal Pemerintah Provinsi Maluku Utara menjadi efektif dan efisien baik dari sisi anggaran maupun kinerja menjadi optimal.

Namun disisi lain, Pemerintah Provinsi Maluku Utara masih terdapat kelemahan, khususnya pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE, Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, Aspek Penyelenggara SPBE, Aspek Penerapan Manajemen SPBE, Aspek Pelaksanaan Audit TIK, dimana pada aspek tersebut pelaksanaannya belum optimal dan beberapa tidak menyertakan bukti dukung, atau ada bukti dukung yang disampaikan namun belum sesuai dengan ketentuan ketentuan untuk aspek yang dimaksud.

Pada Aspek-aspek yang menjadi kelemahan yang telah disebutkan sebelumnya perlu ditingkatkan untuk mengakomodasi arah kolaborasi dan integrasi serta dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Aspek Perencanaan Strategis SPBE, Aspek Penerapan Manajemen SPBE, dan Aspek Pelaksanaan Audit TIK yang tingkat kematangannya masih cukup rendah, agar dapat menggunakan menjadi prioritas, selain itu Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE juga perlu dilakukan review dan perbaikan. Diharapkan dapat melakukan inisiatif penerapan Manajemen SPBE sesuai dengan Peraturan yang berlaku, sehingga pada pelaksanaan evaluasi SPBE selanjutnya sudah dapat memenuhi indikator dan kriteria penilaian sesuai target.

## Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2024
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	4
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	2
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	3
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	3
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	3
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	2
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	1
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	3
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	2
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2

18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	2
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	3
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	2
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE	2
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	2
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	2
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	2
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4

38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	3
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	2
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	4
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	2
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	3
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	2
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	3
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	3
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	3



**panrb**

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI



*Sinergi untuk Indonesia Maju*

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana  
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  
2024